



# DOKUMEN

# RENJA 2022

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GEDUNG WANITA "RAJA SALEHA" LANTAI 2 PULAU DOMPAK

TAHUN ANGGARAN 2021

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia serta ridho-Nya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 telah selesai disusun.

Rancangan Kerja disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rancangan Ini memuat prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sebagai Acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Renja ini memuat 6 Program, 14 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan serta untuk pelaksanaannya memerlukan dana sebesar Rp. *35,350,754,504,-* (*Tiga puluh lima miliar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat rupiah*).

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat khususnya dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Mei 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**Dr.Drs. SYAMSUARDI, MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19630105 199003 1 011

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH .....</b>	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	23
2.3. Isu-isu strategis .....	27
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	30
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	41
<b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	42
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	45
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	48
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	58

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Renja Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah (PD) kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah (PD), Renja Perangkat Daerah (PD) mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah (PD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah (PD) disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah (PD) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Dokumen Renja Perangkat Daerah (PD) pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD). Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah (PD) sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD). Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah (PD) terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja Perangkat Daerah (PD). Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja Perangkat Daerah (PD), orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah (PD), penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah (PD) merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah (PD) yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah (PD) mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan

rancangan Renja Perangkat Daerah (PD ) dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah (PD), evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah (PD). Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah (PD) menetapkan Renja Perangkat Daerah (PD) untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah (PD)pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja Perangkat Daerah (PD) merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Perangkat Daerah (PD) yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran,target capaian program/ kegiatan/ sub kegiatan, target keluaran sub kegiatan, total dana yang diperlukan sub kegiatan.
4. Renja Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen resmi program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) yang akan diaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah (PD) setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah (PD) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312s);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau

- Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 ( Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 ( Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 42);
  21. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437);
  22. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals ( TPB/SDGs) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau adalah Sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Provinsi

Kepulauan Riau pada urusan penanaman modal. Adapun Tujuan dari Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021- 2026.
- b. Merumuskan program dan kegiatan prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
- c. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah;
- d. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
- e. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

## **. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

## **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu**

Kegiatan *review* hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2020 ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan DPMPTSP dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra DPMPTSP serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output DPMPTSP tahun 2021. Input dalam pengertian ini terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output, sedangkan sumberdaya manusia dan bahan baku tidak dimasukan dalam evaluasi ini. Sedang output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. Outcome atau indikator hasil tidak dianalisis pada evaluasi ini, mengingat diperlukan periode yang lebih lama untuk dapat melihat efektifitas kegiatan.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 juga dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut:

- a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasianya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2020 sebagai data awal dalam penyusunan perencanaan tahun 2022;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dapat di lihat pada Tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Indikator Kegiatan)**

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( Outcome )/kegiatan ( Output )	Satuan	Target Kinerja Capaian Program ( Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( n-2)			Target Program dan Kegiatan renja SKPD Tahun berjalan ( Tahun 2021 )	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2020	
						Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan kebutuhan Administrasi Perkantoran	Bulan	60	36	12	12	100	12	60	100
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya kebutuhan administrasi keuangan	Bulan	60	24						

2	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Terpenuhinya kebutuhan administrasi jasa pendukung ( gaji PTT )	Bulan	60	48	12	12	100	12	60	100
3	Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Bulan	60	48	12	12	100	12	60	100
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	Bulan	60	48	12	12	100	12	60	100
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan penataan Kearsipan DPMPTSP Prov.Kepri	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Bulan	60	48	12	12	100	12	60	100
IV	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur</b>	%	35	54	7	2	29	7	54	197
5	Peningkatan SDM Aparatur DPMPTSP Prov.Kepri	Jumlah Peserta Pelatihan Bagi Aparatur BPMPTSP Prov. Kepri	Orang	84	54	7	1	14.29	7	53	63.10
IV	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur Daerah</b>	<b>Pemenuhan Kebutuhan pakaian petugas dan penunjang disiplin aparatur</b>	Orang	324	119	68	68	100	68	119	25.82
6	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pemenuhan Kebutuhan pakaian petugas dan penunjang disiplin aparatur	Orang	324	119	68	68	100	68	119	37

V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	Dokumen	60	48	12	12	100	12	60	100
7	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Buku Laporan Kinerja dan Ikhtisar SKPD	Buku	48	44	12	12	100	4	44	100
8	Koordinasi, perencanaan, Monitoring dan Evaluasi urusan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Koordinasi, perencanaan, Monitoring dan Evaluasi urusan Penanaman Modal	Laporan	70	41	12	12	100	12	100	75.71
	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Buku Laporan Keuangan DPMPTSP Prov. Kepri	buku	50	20						
	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah( LAKIP )	Jumlah Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	buku	60	20						
	Penyusunan SOP DPMPTSP Prov.Kepri	Jumlah Buku Standar Operasional Prosedur DPMPTSP Prov. Kepri	buku	2	1						
	Kegiatan Updating Standar Operasional Prosedur DPMPTSP Prov. Kepri	Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur DPMPTSP Prov. Kepri	Dokumen	2	0						
	Penyusunan Laporan Renja DPMPTSP	Jumlah Buku Laporan Renja DPMPTSP	buku	48	0						

VI	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Percentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM	%	100	190	80	100	125	90	290	290
	Bimbingan dan Penyuluhan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Peserta sosialisasi dan pembinaan.bimbingan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	Orang	245	150	0	0	0	35	180	73.43
	Pengawasan dan pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Laporan	420	294	60	60	100	65	294	70
	Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Investor terhadap PTSP	Nilai Indeks Kepuasan Investor		81	76			0			
	Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Untuk Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah Peserta	Orang	110	0	30	30	100	35	65	59.09
	Konsolidasi Investasi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanaman modal	Jumlah Peserta		280	50			0	0		
	Task Force, Fasilitasi dan Asistensi Pengendalian Penanaman Modal	Jumlah Peserta		145	0		0	0	0		
	Kegiatan Updating dan Penyempurnaan RUPM Prov Kepri	Jumlah dokumen Revisi RUPM	Dokumen	3	1	1	1	100		2	67

VII	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>Persentase Meningkatnya Jumlah Investor Dalam Negeri dan Luar Negeri</b>	%	90	65	0	0	0	85	65	<b>72.22</b>
	Pembuatan Bahan Promosi	Jumlah Jenis Bahan Promosi	Jenis	12	6	1	1	100	35	75	625
	Promosi Dalam Negeri	Jumlah Promosi Investasi dalam negeri	kali	12	5	0	0	0	35	40	333
	Promosi Investasi Luar Negeri	Jumlah Promosi Investasi Luar negeri	kali	12	2	3	3	100	35	40	333
	Kegiatan Kerjasama Media Publikasi	Jumlah lokasi media publikasi	jumlah	9	4	2					
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Investasi	Jumlah Kerjasama Penanaman Modal	MoU	7	1	2					
	Pelatihan Pemasaran dan Promosi Potensi Daerah	Jumlah Peserta Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan	185	30	35					
	Pelatihan Teknis Penyusunan Bahan Promosi	Jumlah Peserta Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan	145	0	35					
VIII	<b>Program Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan</b>	<b>Persentase Pelayanan Perizinan dan Non perizinan</b>	%	100	100	100	100	100	100	100	<b>100</b>
	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap PTSP	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	90		88	81.93	93.10	90		
	Sosialisasi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan PTSP	Jumlah Peserta	Orang	200	80	30	30	100	40	150	75

	Sosialisasi Perijinan dan Non Perijinan	jumlah peserta	Orang	250	110	40	40	100	35	145	60
	Rapat Kerja Teknis PTSP dengan Kab/Kota dan SKPD Teknis/	Jumlah Peserta Rakernis		190	82	30	30	100	30	112	59
	Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.	Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan	izin/non izin	3,710	6155	850	2505	294	880	7035	189
	Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik	Jumlah Izin dan Non Izin yang di layani di Mall Pelayanan Publik	izin/non izin	2,550	608	30	30	100	250	858	33
	Penyusunan Standar Pelayanan Publik DPMPTSP Prov.Kepri	Tersedianya Dokumen SPP	Dokumen	1	1					1	100
	Penerapan Standar ISO 9001:2015 untuk Pelayanan PTSP	Tersedianya Dokumen ISO 9001;2015	Dokumen	1	1					1	100
	Workshop Strategi Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Peserta Workshop	orang	90	55	0	0	0	35	90	100
	Pelaksanaan kegiatan pengawasan Kebijakan dan pelaporan layanan PTSP	Tersedianya laporan pengawasan	Laporan	4	3	1	1	100	1	4	100
	Penyusunan sarana dan prasarana pengaduan	Tersedianya sarana dan prasarana pengaduan	kegiatan	3		1	1	100	1	2	67
	Pencegahan dan Penyelesaian Kasus Perijinan dan Non Perijinan	Tersedianya Dokumen Pencegahan dan Penyelesaian Kasus Perijinan dan Non Perijinan	Dokumen	4					-	-	

	Gelar Sidang Tim Teknis Perizinan	Dokumen Sidang Tim Teknis Perizinan	Dokumen	4	1	1	100	1	2	50	
	Verifikasi lapangan permohonan perizinan	Adanya Dokumen verifikasi lapangan permohonan perizinan	Dokumen	4	1	1	100	1	2	50	
	Penyusunan Buku Panduan Pelayanan Perizinan	Jumlah Buku Panduan Pelayanan Perizinan	buku	650	300						
	Pembuatan Aplikasi Pelayanan Perizinan PTSP	Jumlah Aplikasi		1	1	1	100		2	200	
	Evaluasi Penyelenggaraan PTSP Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Evaluasi	Buku	4					-	-	
	Kegiatan Sarana, Prasarana dan Pendukung Penyelenggaraan Perizinan	Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan		850	850		0	0	850	100	
IX	<b>Program Pengembangan data dan Informasi</b>	<b>Data/Informasi dan aplikasi sistem informasi terkelola dengan baik</b>	bulan	60	48	12	12	100	12	60	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya data Penanaman Modal yang baik	Dokumen	5	4	1	1	100	1	5	100
	Pengembangan Sistem Informasi dan Updating Website DPMPTSP Prov. Kepri	Jumlah pengunjung website DPMPTSP	Jumlah	450	550	100	100	100	100	650	144
	Bimtek Sistem Informasi dan Potensi Investasi Daerah ( SIPID )	Jumlah Peserta	orang	145	20	0	0	0	0	50	34

	Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Website DPMPTSP Prov. Kepri	Jumlah pengunjung website DPMPTSP	jumlah	50	173					173	346
	Kegiatan Pemetaan Potensi Investasi Daerah	Jumlah Buku	buku	40	10	0	0	0	10	20	50
	Pengelolaan manajemen kearsipan dokumen perizinan dan non perizinan	Persentase kearsipan dokumen perijinan dan non perijinan yang baik	%	100	0					-	-
	Peresmian Mall Pelayanan Publik di Kota Batam	terlaksananya peresmian mall pelayanan publik	Kegiatan	1	1					1	100
	Penyusunan Buku Panduan Pelayanan Perizinan	Jumlah Buku Panduan Pelayanan Perizinan	Buku	300	300					300	100
X	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun</b>	<b>Dokumen</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>80</b>
	Rapat Kerja Teknis Perencanaan, Program dan Kegiatan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau dan Kab/Kota.	Jumlah Peserta Rapat Kerja Teknis	Orang	140	30					30	21
	Rapat Koordinasi Penanaman Modal Prov. Kepri	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Penanaman Modal Prov. Kepri	Orang	260	230	50				410	158
	Kegiatan Penyusunan RENSTRA DPMPTSP Prov Kepri	Jumlah Dokumen RENSTRA	Dokumen	2	1				0		-
	Kegiatan Revisi RENSTRA DPMPTSP Prov Kepri	Jumlah Dokumen Revisi RENSTRA	Dokumen	1	1						

	Kegiatan FGD Potensi Investasi Daerah	Jumlah Peserta FGD	Orang	150	50				35	120	80.00
--	---------------------------------------	--------------------	-------	-----	----	--	--	--	----	-----	-------

Dari Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) dan Pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan Tahun 2020 dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan dalam renstra terealisasi dengan baik. Keterbatasan anggaran dan dinamika perubahan kebijakan dan isu yang terjadi mengakibatkan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau tidak leluasa dalam melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan dan mengalami perubahan-perubahan. Namun demikian dari tabel juga dapat kita lihat bahwa hampir semua program kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 dapat terealisasi dengan baik. Realisasi kinerja program yang tidak memenuhi tarket kinerja hasil ada 1 yaitu Program Peningkatan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Dengan 1 ( satu Indikator ) yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PTSP, selebihnya Indikator indikator program dapat memenuhi target.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target kinerja RPJMD urusan penanaman modal yaitu sebagai berikut:

- a. Kurangnya kepastian hukum dalam berinvestasi, ditandai dengan regulasi yang berubah-ubah.
- b. Belum optimalnya promosi dan kerjasama dalam rangka peningkatan investasi.
- c. Kurangnya minat investor untuk berinvestasi, disebabkan keterbatasan infrastruktur dasar yang dapat menunjang investasi.
- d. Belum meratanya investasi di berbagai kabupaten/kota, masih terpusat di Kota Batam, Bintan dan Karimun.

- e. Belum optimalnya pengelolaan data investasi dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- f. Kondisi Pandemi Covid-19.

Penyebab terpenuhinya atau melebihinya target kinerja program sampai sejauh ini adalah kuatnya komitmen dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau untuk tetap terus melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung tercapainya target. Selain itu komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah kabupaten kota maupun Investor mendorong memaksimalkan seluruh daya upaya yang ada untuk mewujudkan target yang ada baik melalui regulasi, promosi, maupun peningkatan SDM.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah (PD) adalah adanya kewajiban bekerja lebih keras mengejar target di tahun berikutnya untuk memenuhi kekurangan capain target pada tahun 2020. Untuk target yang telah terpenuhi atau melebihi akan lebih ditingkatkan lagi agar target akhir Renstra lebih mudah dicapai.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan seluruh stakeholder untuk mengantisipasi kejadian serupa dan solusi penanganannya. Seluruh stakeholder harus mengambil peran masing-masing dalam memecahkan masalah tersebut.
- 2) Meningkatkan Pelayan Perizinan yang cepat dan tepat waktu
- 3) Adanya upaya dalam memprioritaskan program/kegiatan yang capaian target nya belum dapat terpenuhi.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (PD)**

Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan tugas dan fungsinya telah mencapai target bahkan melebihi, pencapaian beberapa indikator dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN diperoleh berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang dilaporkan oleh pelaku usaha/investor, dimana indikator tersebut dijalankan sesuai dengan program yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal yaitu program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut merupakan hasil dari pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan. Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing ( PMA ) pada tahun 2020 sebesar 1.649,4(US\$) atau Rp. 23.750.858.880.000,- ( Dua puluh tiga triliun tujuh ratus lima puluh milliar delapan ratus lima puluh delapan ratus lima puluh ribu rupiah dengan 2.268 Proyek atau 300,65% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.7.900.000.000.000,- (Tujuh triliun sembilan ratus miliar rupiah), Nilai realisasi investasi (PMA) Tahun 2020 ini mengalami peningkatan sebesar 16,14% dibanding Nilai realisasi investasi (PMA) pada Tahun 2019 yaitu sebesar 1,363,365 ( US\$.Ribu ) atau Rp. 20.450.475.000.000,- (Dua puluh triliun empat ratus lima puluh miliar empat ratus tujuh puluh lima ratus rupiah). \* sumber data BKPM tanggal 31 Desember 2020

Capaian target Nilai Realisasi Investasi ( PMDN ) Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 14.249.025.600.000,- (Empat belas juta dua ratus

empat puluh Sembilan milliar dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau 1.781% dengan 2.294 Proyek dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.800.000.000.000,- (Delapan ratus miliar rupiah) atau naik sebesar 152%. Dibanding Nilai Realisasi Investasi (PMDN) Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 5,656,425,300,000,- ( Lima triliun enam ratus lima puluh enam miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).

2. Pencapaian jumlah investor dalam negeri yang sangat tinggi ini dikarena penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( OSS ) Online Single Submission.

Untuk indikator jumlah investor dalam negeri dan luar negeri diperoleh berdasarkan penghitungan jumlah izin yang terdaftar di OSS ( Online Single Submission ) yang berinvestasi di Provinsi Kepri. Ditahun 2018 Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( OSS ) Online Single Submission, sehingga Sistem Online SPIPISE yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal RI untuk permohonan Izin Prinsip, Izin Prinsip Perluasan, Izin Prinsip Alih Status, Izin Prinsip Penggabungan dan Izin Prinsip Perubahan ditutup.

Capaian Kinerja Jumlah Investor Dalam Negeri diperoleh dari data Perusahaan Izin Prinsip PMDN ( data dari sistem SPIPISE ) Tahun 2019 di ganti menjadi data perusahaan yang masuk di dalam sistem OSS.

Capaian Kinerja Jumlah Investor Dalam Negeri Tahun 2020 berdasarkan data OSS sebanyak 5,054 investor atau 3,369% dari target yang di tetapkan yaitu 150 Investor, Capaian Jumlah Investor Dalam Negeri Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar

15,78% dibandingkan Capaian Jumlah Investor Dalam Negeri Tahun 2019 yaitu 4,365 Investor

Capaian Kinerja Jumlah Investor Luar Negeri Tahun 2020 sebanyak 660 investor atau 623% dari target yang di tetapkan yaitu 106 Investor, Capaian Jumlah Investor Luar Negeri Tahun 2020 naik 134% dibandingkan Capaian Jumlah Investor Luar Negeri Tahun 2019 yaitu 493 Investor.

3. Untuk indikator nilai indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan satu pintu dan persentase pelayanan sesuai SOP didukung oleh Program peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan, yang merupakan tolak ukur keberhasilan bagi DPMPTSP Prov. Kepri dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan. Dalam hal ini, terdapat beberapa unsur dalam pelayanan yang harus ditingkatkan yaitu: Kesopanan, Keramahan, dan Kedisiplinan Petugas, Biaya Pelayanan dan Produk/Hasil Layanan. Realisasi kinerja program yang tidak memenuhi tarket kinerja hasil. Berdasarkan pengukuran keseluruhan kuesioner (100 kuesioner) yang telah diisi oleh responden terhadap kualitas ruang lingkup pelayanan, diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan angka Indeks sebesar 81,93 yang menunjukkan mutu pelayanan B dengan kategori BAIK, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 62,51 – 81,25.

Ada 1 yaitu Program Peningkatan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Dengan 1 ( satu Indikator ) yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PTSP, selebihnya Indikator indikator program dapat memenuhi target Penjelasan terkait pencapaian kinerja perangkat daerah tergambar dalam tabel 2.2 berikut ini:

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah (PD)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian					Proyeksi
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA)	Rp Milyar	7.108	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100	10.719	13.823	11.139	14.524	23.751	8100
2	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	Rp Milyar	492,5	500	600	700	800	900	493	1.398	3.617	4.561	14.249	900
3	Jumlah Investor Dalam Negeri	Investor	191	135	140	145	150	155	191	215	157	4.365	5.054	155
4	Jumlah Investor Luar Negeri	Investor	175	100	102	104	106	108	100	203	120	493	660	108
5	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap PTSP Provinsi Kepulauan Riau	Nilai	81,25	81,00	84,00	86,00	88,00	90,00	81,25	76,67	77,20	82,33	81,93	90
6	Persentase Pelayanan Sesuai SOP	%	100	80	81	82	83	84	100	100	100	93	95	84

### **2.3 Isu-isu Strategis Tahun 2022**

Dalam upaya peningkatan penanaman modal dan pelayanan Perizinan secara terpadu di Tahun 2022, perlu adanya program dan kegiatan yang memperhatikan perubahan dan dinamika perubahan lingkungan strategis antara lain dengan pelaksanaan dan berlakunya komitmen pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan perdagangan global, Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan kebijakan ekonomi yang bertujuan meningkatkan daya saing secara nasional, pelayanan Perizinan dan peningkatan peluang penanaman modal. Demikian pula dalam pelayanan di daerah perlu memperhatikan dan kebutuhan dari kalangan dunia usaha/ dunia industri dan masyarakat pada umumnya.

#### **1. Peluang (*Opportunities*) :**

- a. Kebijakan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi peluang meningkatkan penanaman modal di Provinsi Kepulauan Riau, terutama terkait dengan meningkatnya basis produksi, industri dan perdagangan yang terpadu.
- b. Secara geografis letak Provinsi Kepulauan Riau sangat strategis berada di selat Malaka dan laut Cina Selatan, berbatasan langsung dengan pusat bisnis dan keuangan di Asia Pasifik, yakni Negara Singapura dan Malaysia. Sehingga mempermudah akses ke pusat-pusat bisnis, industri manufaktur dan jasa-jasa keuangan internasional di Kawasan Asia Tenggara.
- c. Pengelolaan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis dan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam, Karimun dan Bintan (Free Trade Zone) dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

- d. Kekayaan potensi sumber daya alam dan potensi bahan tambang yang dapat menjadi andalan dan daya tarik bagi penanaman modal di Provinsi Kepulauan Riau.
- e. Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan setengah terampil dalam memberikan kontribusi terhadap kegiatan penanaman modal dan pengembangan industri pengolahan, perdagangan dan jasa-jasa penunjang perindustrian.
- f. Adanya pemberian insentif fiskal, kebijakan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan secara terpadu dalam kegiatan penanaman modal dan perizinan pada umumnya. Kebijakan tersebut semakin ditingkatkan melalui pelayanan berbasis teknologi informatika (TI).
- g. Kebijakan peningkatan penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 – 2025 dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu berbasis teknologi informatika.
- h. Kebijakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 44 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, termasuk di wilayah di Provinsi Kepulauan Riau meningkatkan daya saing daerah dan menjadi daya tarik investasi di daerah.

## **2. Tantangan (*Threats*) :**

- a. Adanya kesenjangan pembangunan dan perkembangan sarana dan prasarana dasar antar wilayah di Provinsi Kepulauan Riau sehingga menghambat investasi di daerah.
- b. Belum optimalnya mekanisme kerja dan koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah di lingkungan wilayah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan promosi dan pelayanan penanaman modal di daerah.
- c. Meningkatnya tuntutan pelayanan publik secara prima baik dari kalangan dunia usaha, perdagangan dan perusahaan jasa-jasa dan masyarakat pada umumnya dalam pelayanan perijinan dan non perijinan.

Permasalahan yang timbul berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana dalam menunjang untuk melaksanakan tugas pokok dan peningkatan pelayanan masih terbatas, antara lain belum tersedianya gedung pusat pelayanan terpadu dan sumberdaya aparatur yang sesuai bidang teknologi informasi terbatas.
2. Jumlah aparatur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu relatif terbatas dalam bidang pelayanan, belum adanya pejabat fungsional tertentu dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan.
3. Masih kurang lengkapnya data dan informasi tentang potensi dan peluang investasi di kabupaten/kota yang akan dipromosikan kepada investor, terutama tentang proyek yang telah siap untuk dipromosikan (Ready to Sell) yang telah memiliki dokumen perencanaan yang jelas.

4. Pertumbuhan investasi penanaman modal asing (PMA) lebih banyak terkonsentrasi di 3 wilayah utama yaitu Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun, yang lebih siap dari infrastruktur fasilitas yang layak maupun akses ke wilayah, sementara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau kurang lengkapnya data dan informasi potensi dan peluang investasi yang siap akan ditawarkan.
5. Koordinasi dan kerjasama antar kabupaten/kota belum optimal dalam rangka promosi bersama, promosi potensi dan peluang investasi masing – masing kabupaten/kota, melakukan promosi potensi dan peluang investasi. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran di tingkat kabupaten/kota untuk melakukan promosi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Belum adanya Peraturan Daerah yang memberikan kemudahan dalam berinvestasi.
7. Belum semua Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).

## **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Sebagaimana program dan kegiatan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020, setelah melalui pertimbangan analisa kebutuhan program dan kegiatan serta anggaran yang akan menjadi garapan di tahun 2022 diperlukan perubahan/ penyesuaian atas RKPD dimaksud yang merupakan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022.

Perubahan/ penyesuaian terjadi pada semua program teknis, baik rincian kegiatan, nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran pada masing-masing program dan kegiatan. Dinamika perubahan dan

kebutuhan yang terjadi dilapangan menjadi alasan pertimbangan terhadap perubahan/penyesuaian RKPD 2022. Demikian halnya dengan penetapan anggaran serta target capaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan telah disesuaikan. Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2022 dapat dilihat **tabel 2.4** berikut;

**Tabel.2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022																				
Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					35,350,754,504							33,972,720,000					
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					21,950,754,504							16,872,720,000					
2	18	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				700,000,000							850,000,000					
2	18	01	1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang tersusun.			1 Dokumen	100,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP				
2	18	01	1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun			1 Dokumen	50,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP				
2	18	01	1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun			1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP				
2	18	01	1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun			1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP				
2	18	01	1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun			1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP				
2	18	01	1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Buku Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD			12 Buku	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Buku	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP				
2	18	01	1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP				

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2022**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
Nasional	Daerah																		
2	18	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8,192,034,504								8,750,000,000		
2	18	01	1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN			14 Bulan	7,612,074,504	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14 Bulan	8,000,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2	18	01	1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Bulan	549,960,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Bulan	700,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2	18	01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Buku Laporan Keuangan DPMPTSP Prov. Kepri			1 Laporan	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2	18	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					44,220,000									44,220,000	
2	18	01	1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			12 Bulan	29,220,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Bulan	29,220,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2	18	01	1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	15,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2	18	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					570,000,000									675,000,000	
2	18	01	1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			12 Bulan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Bulan	125,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2	18	01	1.05 02	Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaiian Dinas Yang Diadakan			70 Unit	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					70 Unit	250,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 18 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Peserta				15 Peserta	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Peserta	25,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2 18 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pelatihan Bagi Aparatur DPMPTSP Prov. Kepri				20 Orang	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Orang	175,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2 18 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek				15 Peserta	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Peserta	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2 18 01 1.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,115,000,000								1,335,000,000		
2 18 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	15,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2 18 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Bulan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2 18 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga				12 Bulan	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	40,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2 18 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penuhan kebutuhan bahan logistik kantor				12 Bulan	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	80,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2 18 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penuhan kebutuhan jasa Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	45,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
										Nasional	Daerah						
2.18.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12 Bulan	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
2.18.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pemenuhan kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu			12 Bulan	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	25,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Luar Daerah dan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat			12 Bulan	800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	1,000,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
2.18.01.1.07.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					9,600,000,000								3,170,000,000			
2.18.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan			2 Unit	800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	800,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
2.18.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diadakan			20 Unit	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Unit	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
2.18.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan			10 Unit	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Unit	150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
2.18.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Diadakan			20 Unit	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Unit	120,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
2.18.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Atau Bangunan Yang Diadakan			1 Gedung	5,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Gedung	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPJMD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas										
										Nasional	Daerah									
2.18.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diduduki	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diduduki				12 Bulan	3,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	2,000,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP					
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,414,500,000								1,468,500,000					
2.18.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat				12 Bulan	135,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	135,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP					
2.18.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP					
2.18.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Bulan	95,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP					
2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor ( Gaji PTT ) Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor ( Gaji THL )				13 Bulan 12 Bulan	1,033,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13 Bulan 12 Bulan	1,033,500,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP					
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						315,000,000								580,000,000					
2.18.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				12 Bulan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	400,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP					
2.18.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan Mebel				12 Bulan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP					

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2022**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
Nasional	Daerah																		
2	18	01	1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Terpelihara				12 Bulan	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2	18	01	1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan Kebutuhan pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya				12 Bulan	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2	18	02		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>						1,300,000,000								1,700,000,000	
2	18	02	1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						500,000,000								750,000,000	
2	18	02	1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Regulasi dan Laporan				1 Dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	350,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2	18	02	1.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Evaluasi				1 Laporan	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	400,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2	18	02	1.02	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</b>						800,000,000								950,000,000	
2	18	02	1.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen RUPM Provinsi Kepulauan Riau				1 Dokumen	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	550,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2	18	02	1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Investasi Daerah				1 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata			1 Dokumen	400,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2	18	03		<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>						5,000,000,000								6,300,000,000	

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2022**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
													Nasional	Daerah				
2	18	03	1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						5,000,000,000							6,300,000,000	
2	18	03	1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Bahan Promosi Jumlah Peserta Pelatihan/Bimbingan Teknis Jumlah Promosi: Investasi Melalui Media Cetak dan Elektronik				2 Bahan Promosi 35 Peserta 2 Media Publikasi	2,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Bahan Promosi 35 Peserta 2 Media Publikasi	2,300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	03	1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Event Promosi Investasi				2 Event	3,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Event	4,000,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	04		<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>						4,000,000,000							5,400,000,000	
2	18	04	1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundungan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						4,000,000,000							5,400,000,000	
2	18	04	1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Verifikasi Lapangan Permohonan Perizinan Jumlah Izin dan Non Izin Yang Diterbitkan				1 Dokumen 900 Izin dan Non Izin	2,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal		1 Dokumen 900 Izin dan Non Izin	2,500,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	04	1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Laporan Pemantauan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan				1 Dokumen	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Dokumen	700,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	04	1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan/Dokumen Analisis Hasil Penanganan Pengaduan Persentase Publikasi Informasi Layanan dan tindaklanjut pengaduan/ laporan masyarakat				1 Dokumen 100 %	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Dokumen 100 %	1,500,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah				
2 18 04 1.02 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Pemberian Kebijakan Fasilitas/Insentif Daerah Dengan Instansi Terkait			1 Dokumen		500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		1 Dokumen	700,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2 18 05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>						2,500,000,000							2,900,000,000	
2 18 05 1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Membuat Kewenangan Daerah Provinsi						2,500,000,000							2,900,000,000	
2 18 05 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Peserta Rapat			50 Peserta		600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		50 Peserta	700,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2 18 05 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan Pembinaan/Bimbingan Kegiatan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha			65 Perusahaan		900,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		65 Perusahaan	1,000,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2 18 05 1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)			150 Perusahaan		1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		150 Perusahaan	1,200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2 18 06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>						600,000,000							800,000,000	
2 18 06 1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi						600,000,000							800,000,000	

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2022**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
													Nasional	Daerah				
2	18	06	1.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Laporan Data/Informasi Penanaman Modal Jumlah Peserta			12 Laporan 40 Peserta	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		12 Laporan 40 Peserta	800,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
									TOTAL	35,350,754,504								33,972,720,000

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah (PD), salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakikatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD). Sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Penanaman Modal dan PTSP berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan. Dalam kesempatan Musrenbang di tahun 2022, apabila ada aspirasi masyarakat maka akan menjadi perhatian serius Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien.

Di tahun 2021 usulan Program/kegiatan Tahun 2022 yang berasal dari masyarakat pada saat Musrenbang Provinsi Kepulauan Riau tidak ada.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Tujuan yang akan dicapai Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu "Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian" sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020- 2024. Dengan mempertimbangkan Sasaran pembangunan Tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

BKPM akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan "Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian" yang akan dicapai melalui arah kebijakan "Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor

Riil, dan Industrialisasi” dan strategi “Memperbaiki Iklim Usaha dan Meningkatkan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan”. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi akan dilaksanakan melalui:

1. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah;
2. Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
3. Reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan collective bargaining, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem perlindungan social universal bagi pekerja, pembentahan sistem pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara efektif;
4. Penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha; dan

- Peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN, antara lain melalui pembentukan holding BUMN dan membuka pasar pada jaringan internasional.

Berikut ini adalah hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kepulauan Riau dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra BKPM tahun 2020- 2024.

**Tabel 3.1**

**Permasalahan Pelayanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Terhadap Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Strategis Renstra BKPM Tahun 2020-2024**

<b>Tujuan dan Sasaran</b>	<b>Permasalahan Pelayanan SKPD</b>	<b>Faktor</b>	
		<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
<p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta</li> <li>Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.</li> </ol> <p>Sasaran strategis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya realisasi penanaman modal;</li> <li>Meningkatnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Belum optimalnya penanganan industri yang terdampak Covid-19, mencakup pemberian insentif, pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah atau fasilitasi peminjaman modal.</li> <li>(2) Belum optimalnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP). Hal ini ditunjukkan nilai IKM yang menurun dari 82,34 pada tahun 2019 menjadi 81,93 pada tahun 2020. Kemudahan layanan perizinan dengan one day service sangat diperlukan agar jumlah dan nilai investasi dapat semakin meningkat dan selaras dengan iklim investasi nasional serta menghindari semakin panjangnya alur birokrasi perizinan. Selain itu, belum optimalnya penerapan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).</li> <li>(3) Belum optimalnya kerjasama ekonomi dengan pihak swasta agar dapat berinvestasi pada proyek jangka panjang seperti infrastruktur.</li> <li>(4) Sebaran investasi yang belum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya regulasi daerah (Perda dan Pergub) yang mengatur tentang pemberian insentif penanaman modal maupun pemberian insentif bagi industri yang terdampak Covid-19.</li> <li>2. Keterbatasan kualitas Sumber daya manusia dalam pelayanan perizinan dan non perizinan dan peningkatan penanaman modal</li> <li>3. Kurangnya anggaran untuk penyediaan data potensi dan peluang investasi di masing-masing kabupaten yang komprehensif</li> <li>4. Kurangnya koordinasi dalam upaya mempersingkat waktu penyelesaian layanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kemudahan regulasi dalam rangka peningkatan investasi daerah seiring dengan implementasi UU cipta kerja.</li> <li>2. Penerapan online single submission (OSS) dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.</li> <li>3. Peningkatan jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP.</li> </ol>

	<p>kepercayaan pelaku usaha/penanaman modal; dan</p> <p>3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.</p>	<p>proporsional, secara antar wilayah maupun antar sektor yang saat ini didominasi oleh Batam dan adanya hambatan investasi karena wilayah Kepulauan Riau didominasi oleh laut. Adanya kajian tentang peta potensi antar wilayah dan antar sektor sangat diperlukan</p> <p>(5) Kemanfaatan investasi yang belum maksimal. Hal ini disebabkan saat ini kemanfaatan investasi adalah untuk penyerapan tenaga kerja dan belum bisa mensejahterakan masyarakat khususnya pelaku UKM. Selain itu, sebagian besar investasi merupakan sektor industri berskala besar untuk kebutuhan industri nasional yang belum ada keterkaitan dengan sumberdaya lokal.</p> <p>Kurangnya data potensi dan informasi potensi dan peluang investasi yang komprehensif menyajikan data terkait investasi seperti tanah, tenaga kerja, upah, dan perhitungan keuntungan investasi untuk digunakan sebagai media promosi dan kerjasama investasi daerah.</p>	<p>perizinan dan non perizinan sesuai Standard Operating Procedure (SOP) dan peningkatan layanan online.</p> <p>5. Dukungan infrastruktur dan logistik yang kurang memadai dalam rangka menunjang peningkatan investasi Perlambatan dan stagnasi pertumbuhan ekonomi dunia akibat pandemi covid-19.</p>	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Adapun tujuan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam menyusun Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas promosi dan penyiapan bahan promosi (Investment Project Ready To Offer / proyek investasi Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dengan mempermudah pelayanan penanaman modal yang siap ditawarkan)
2. Mewujudkan pengelolaan dan ketersediaan data penanaman modal berbasis teknologi informasi
3. Meningkatkan manajemen berbasis risiko dan akuntabilitas kinerja melalui perencanaan berbasis kinerja, pengelolaan keuangan yang

efektif dan akuntabel, dan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penerapan proses bisnis dan SOP, dan peningkatan aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas.

4. Meningkatkan realisasi dan iklim investasi melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang berdaya saing.
5. Meningkatkan minat investor untuk berinvestasi melalui penerapan kebijakan pemberian fasilitas/incentif penanaman modal.

Tujuan dan Sasaran Program Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai berikut :

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Kondisi Awal</b>	<b>Target</b>
				<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2022</b>
Terwujudnya Peningkatan Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja Baru		Nilai Realisasi Investasi PMA	Miliar rupiah	23.751	22.500
		Nilai Realisasi Investasi PMDN	Miliar rupiah	14.249	12.500
	Meningkatnya iklim investasi daerah yang kondusif	a. Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	%	na	0
		b. Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	%	na	7%
		c. Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	%	99	100
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	nilai	81,93	83,15
		Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	%	95,21	80
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP	Predikat	B	BB

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Penetapan program dan kegiatan DPMPTSP untuk Rencana Kerja DPMPTSP tahun 2021 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra DPMPTSP tahun 2016-2021, adapun program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah dalam mencapai Visi dan Misi daerah, sebagaimana yang tertuang dalam rancangan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan , disamping melaksanakan program dan Rutin Perangkat Daerah, pada tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau dalam rencana kerja Tahun 2021 merencanakan akan melaksanakan 3 ( tiga) Urusan Wajib yaitu : Kesekretariatan, Urusan Penanaman Modal, urusan Perencanaan. Dari ketiga urusan tersebut di breakdown ke dalam 10 ( sepuluh ) Program dan 49 Kegiatan.

Ringkasan Program dan Kegiatan DPMPTSP pada tahun 2021 dapat dilihat pada **tabel 4.1.** berikut.

**Tabel 4.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2021**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022													
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Nasional	Daerah	
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
<b>2.18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>					35,350,754,504							33,972,720,000
<b>2.18.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>					21,950,754,504							16,872,720,000
<b>2.18.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					700,000,000							850,000,000
2.18.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencra dan Renja Perangkat Daerah yang tersusun.			1 Dokumen	100,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun			1 Dokumen	50,000,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun			1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun			1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun			1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Buku Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 Buku	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Buku	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
										Nasional	Daerah						
2 18 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8,192,034,504							8,750,000,000			
2 18 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	7,612,074,504	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14 Bulan	8,000,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2 18 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Bulan	549,960,000	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	700,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2 18 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Buku Laporan Keuangan DPMPTSP Prov. Kepri				1 Laporan	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2 18 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						44,220,000							44,220,000			
2 18 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Bulan	29,220,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	29,220,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2 18 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	15,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2 18 01 1.05	Administrasi Kepegawaiwan Perangkat Daerah						570,000,000							675,000,000			
2 18 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				12 Bulan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	125,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2 18 01 1.05 02	Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaiian Dinas Yang Diadakan				70 Unit	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70 Unit	250,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 18 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Peserta				15 Peserta	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Peserta	25,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2 18 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pelatihan Bagi Aparatur DPMPTSP Prov. Kepri				20 Orang	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Orang	175,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2 18 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek				15 Peserta	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Peserta	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2 18 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,115,000,000								1,335,000,000		
2 18 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	15,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2 18 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Bulan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2 18 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga				12 Bulan	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	40,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2 18 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penuhan kebutuhan bahan logistik kantor				12 Bulan	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	80,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2 18 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penuhan kebutuhan jasa Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	45,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2.18.01.1.05.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Bulan		30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Bulan	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2.18.01.1.05.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penuhan kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu				12 Bulan		25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Bulan	25,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2.18.01.1.05.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Luar Daerah dan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat				12 Bulan		800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Bulan	1,000,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							9,600,000,000							3,170,000,000		
2.18.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan				2 Unit		800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Unit	800,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2.18.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diadakan				20 Unit		50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20 Unit	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2.18.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan				10 Unit		150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 Unit	150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2.18.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Diadakan				20 Unit		100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20 Unit	120,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2.18.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Atau Bangunan Yang Diadakan				1 Gedung		5,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Gedung	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2022**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
Nasional	Daerah																			
2	18	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan			12 Bulan	3,500,000,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	2,000,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2	18	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					1,414,500,000									1,468,500,000	
2	18	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat			12 Bulan	135,000,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	135,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2	18	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			12 Bulan	150,000,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2	18	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12 Bulan	95,000,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2	18	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor ( Gaji PTT ) Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor ( Gaji THL )			13 Bulan 12 Bulan	1,033,500,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13 Bulan 12 Bulan	1,033,500,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2	18	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					315,000,000									580,000,000	
2	18	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			12 Bulan	200,000,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	400,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2	18	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan Mebel			12 Bulan	50,000,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2022**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target
Nasional	Daerah																	
2	18	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Terpelihara			12 Bulan	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan Kebutuhan pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya			12 Bulan	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dari PTSP
2	18	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>					1,300,000,000							1,700,000,000	
2	18	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					500,000,000							750,000,000	
2	18	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Regulasi dan Laporan			1 Dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	350,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	02	1.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Evaluasi			1 Laporan	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	400,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	02	1.02		<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</b>					800,000,000							950,000,000	
2	18	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen RUPM Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Peserta Rapat			1 Dokumen 30 Peserta	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen 30 Peserta	550,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Investasi Daerah			1 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata		1 Dokumen	400,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	03			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>					5,000,000,000							6,300,000,000	

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2022**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
													Nasional	Daerah						
2	18	03	1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					5,000,000,000									6,300,000,000		
2	18	03	1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Bahan Promosi Jumlah Peserta Pelatihan/Bimbingan Teknis Jumlah Promosi Investasi Melalui Media Cetak dan Elektronik			2 Bahan Promosi 35 Peserta 2 Media Publikasi	2,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Bahan Promosi 35 Peserta 2 Media Publikasi	2,300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2	18	03	1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Event Promosi Investasi			2 Event	3,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Event	4,000,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2	18	04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					4,000,000,000								5,400,000,000			
2	18	04	1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					4,000,000,000								5,400,000,000			
2	18	04	1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Bisnis Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Verifikasi Lapangan Permohonan Perizinan Jumlah Izin dan Non Izin Yang Diterbitkan			1 Dokumen 900 Izin dan Non Izin	2,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal			1 Dokumen 900 Izin dan Non Izin	2,500,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2	18	04	1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Laporan Pemantauan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan			1 Dokumen	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata			1 Dokumen	700,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2	18	04	1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan/Dokumen Analisis Hasil Penanganan Pengaduan Persentase Publikasi Informasi Layanan dan tindaklanjut pengaduan/ laporan masyarakat			1 Dokumen 100 %	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata			1 Dokumen 100 %	1,500,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 18 04 1.02 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Pemberian Kebijakan Fasilitas/Insentif Daerah Dengan Instansi Terkait				1 Dokumen	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			1 Dokumen	700,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2 18 05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>						2,500,000,000								2,900,000,000		
2 18 05 1.01	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>						2,500,000,000								2,900,000,000		
2 18 05 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Peserta Rapat				50 Peserta	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			50 Peserta	700,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2 18 05 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan/Bimbingan Kegiatan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha	Jumlah Perusahaan				65 Perusahaan	900,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			65 Perusahaan	1,000,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2 18 05 1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)				150 Perusahaan	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			150 Perusahaan	1,200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2 18 06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>						600,000,000								800,000,000		
2 18 06 1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi						600,000,000								800,000,000		

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd)  
Provinsi Kepulauan Riau  
Tahun 2022**

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
											Nasional	Daerah						
2	18	06	1.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.	Jumlah Laporan Data/Informasi Penanaman Modal Jumlah Peserta			12 Laporan 40 Peserta	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata	12 Laporan 40 Peserta	800,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
<b>TOTAL</b>								<b>35,350,754,504</b>							<b>33,972,720,000</b>			

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2022 telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan di tingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah.

Pada Renja tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau telah merencanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 6 program, 14 kegiatan dan 53 Sub Kegiatan sesuai KEPMENDAGRI 050-3708 Tahun 2020. Perencanaan memang bukan segala-galanya, tetapi tanpa proses perencanaan yang baik maka pelaksanaan program dan kegiatan tidak akan berjalan baik. Dengan disusunnya dokumen Renja Organisasi Perangkat Daerah ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

Renja Tahun 2022 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau untuk Tahun Anggaran 2022. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga

akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Dokumen Perencanaan

Dokumen Renja Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022, Renja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mewujudkan good governance di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Mei 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**Dr.Drs. SYAMSUARDI, MM**

Pembina Utama Madya / IV d  
NIP. 19630105 199003 1 011

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

## RANWAL RENJA 2022

*INVESTMENT OFFICE AND ONE-STOP INTEGRATED SERVICE  
RIAU ISLANDS PROVINCE*